

## **PERAN KOPERASI DALAM MANAJEMEN KEBUN ANGGOTA PADA POLA KEMITRAAN KKPA KUD**

**Lilis Sofiana<sup>1</sup>, Purwadi<sup>2</sup>, Tri Endar Suswatiningsih<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa fakultas Pertanian INSTIPER

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Pertanian INSTIPER

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran koperasi dalam manajemen kebun anggota, mengetahui apakah koperasi telah menyampaikan sosialisasi dengan jelas sehingga calon petani anggota paham dengan program kemitraan yang sedang dijalankan, mengetahui hak dan kemudahan apa saja yang diberikan kepada petani anggota serta mendeskripsikan tanggapan / sikap petani anggota plasma kelapa sawit terhadap peran koperasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *analisis deskriptif* dan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara / kuesioner, dan pencatatan. Metode pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* berdasarkan status keanggotaan petani anggota KUD Langgeng Giri Sako yang sudah selama dua tahun menjadi anggota dan tinggal di desa Giri Sako sebanyak 30 responden. KUD Langgeng Giri Sako sangat berperan dalam manajemen kebun anggota. Sebelum melakukan pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA yang bermitra dengan PT. CRS, perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat calon petani anggota untuk kepentingan bersama. Dalam perannya, KUD Langgeng Giri Sako menyediakan pelayanan kepada petani anggota seperti perkreditan / penyediaan modal, saprodi, transportasi TBS, penjualan TBS, penyuluhan dan pelatihan serta membentuk kelompok tani untuk petani anggota sekaligus pengawas. Petani anggota berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan bersifat terbuka dari KUD Langgeng Giri Sako dan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi dan pelayanan yang ada. Dengan adanya KUD Langgeng Giri Sako, petani anggota merasa puas terhadap peran KUD Langgeng Giri Sako yang dirasakan sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka.

**Kata kunci :** Kemitraan, Peran KUD, Petani Anggota.

### **PENDAHULUAN**

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis jacq*) pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1848. Kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrian Hallet, seorang Belgia yang telah belajar banyak tentang kelapa sawit di Afrika. Budidaya yang dilakukan diikuti oleh K. Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sejak saat itu perkebunan kelapa sawit di Indonesia berkembang (Pahan, 2006).

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Sangat dipahami bahwa pembangunan agribisnis kelapa sawit merupakan industri yang diyakini bisa membantu pemerintah untuk mengetaskan

kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan industri kelapa sawit merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, berupa lahan yang subur, tenaga kerja yang produktif, dan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun dengan curah hujan yang cukup dan hampir merata. Hal itulah yang menjadi keunggulan kompetitif Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain. Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif dengan produksi minyak per hektar yang paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati lainnya (Pahan, 2008).

Agribisnis kelapa sawit mempunyai peranan yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia melalui peningkatan nilai tambah, ekspor, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja

baru. Dari sisi makro sektor perkebunan masih menjadi parameter penyerapan tenaga kerja, investasi pembangunan, nilai ekspor komoditi, surplus neraca perdagangan, dan pendapatan para petani. Minyak kelapa sawit (MKS) merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis karena merupakan bahan baku utama pembuatan minyak makan. Permintaan akan minyak makan di dalam dan luar negeri yang kuat merupakan indikasi pentingnya peranan komoditas kelapa sawit dalam perekonomian bangsa (Pahan, 2008).

Pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dikenal dengan tiga bentuk utama usaha perkebunan, yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) (Mangoensoekarjo dan Haryono, 2003). Pembangunan kelapa sawit baik yang dilakukan oleh perkebunan besar maupun oleh perkebunan rakyat telah berkembang dengan sangat pesat. Awal tahun 1968, areal kelapa sawit yang semula hanya terbatas di tiga wilayah (Sumatera Utara, Aceh dan Lampung) saat ini sudah berkembang di 22 daerah Propinsi. Luas areal tahun 1968 seluas 105.808 ha dengan produksi 167.669 ton, pada tahun 2010 telah meningkat menjadi 8,992 juta hektar dengan produksi sekitar 23,096 juta ton minyak sawit (Anonim, 2012).

Perkembangan perusahaan perkebunan kelapa sawit, telah terjadi perubahan secara mendasar dalam pola pengusahaannya dan menjadikan komoditas kelapa sawit sebagai bagian dari komoditas perkebunan rakyat. Kalau pada awalnya perkebunan kelapa sawit hanya dilakukan oleh perkebunan besar, maka saat ini terdapat areal kelapa sawit rakyat seluas 38 % dari total areal kelapa sawit (Anonim, 2012).

Perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia mengalami peningkatan, tercatat tahun 2013 luasnya mencapai 10.010.824 hektar. Total luas perkebunan sawit pada 2014 seluas 10.210.892 hektar atau mengalami peningkatan. Dari luas 10.210.892 hektar, perkebunan rakyat mengelola 4.454.892 hektar, swasta 5.055.409 hektar, dan BUMN 700.591 hektar. Diperkirakan luas

perkebunan sawit 2015 akan bertambah menjadi 10.721.436 hektar dengan rincian perkebunan rakyat 4.810.271 hektar, swasta 5.207.071 hektar dan BUMN 704.094 hektar (Anonim, 2014).

Permintaan minyak kelapa sawit dunia mengalami peningkatan setiap tahun terutama dari India dan Cina. Peningkatan permintaan ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan perkapita penduduk dunia. Hal ini harus diikuti dengan peningkatan produksi minyak kelapa sawit. Saat ini pengusaha kelapa sawit mengalami kesulitan dalam memperluas lahan, akibat pemberlakuan moratorium izin perkebunan baru dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang berakhir pada 20 Mei 2013 dan telah diperpanjang selama dua tahun ke depan. Akibatnya peningkatan produksi sulit dilakukan melalui perluasan lahan. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak kelapa sawit Indonesia adalah dengan peningkatan produktivitas kebun, terutama milik petani. Kebun sawit milik petani saat ini hanya menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) kira-kira 14 ton<sup>-1</sup> hektar sedangkan kebun milik Perusahaan Besar Swasta (PBS) bisa mencapai 36 ton<sup>-1</sup> hektar (Anonim, 2012).

Perbedaan produktivitas ini disebabkan dualisme sistem ekonomi pertanian Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Boeke. Perusahaan kelapa sawit sudah menerapkan sistem pertanian modern dalam menjalankan usahataniya sedangkan petani masih tetap menggunakan sistem pertanian tradisional (Mubyarto, 1987). Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi TBS petani adalah dengan melaksanakan program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) adalah pengembangan perkebunan dengan menggunakan Perkebunan Besar sebagai inti dan membimbing Perkebunan Rakyat sekitarnya sebagai plasma, dalam suatu sistem

kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan (Anonim, 2012)

Perkebunan kelapa sawit rakyat saat ini, terdapat dua kolompok petani kelapa sawit, yaitu petani plasma dan non plasma. Menurut Marcus Colchester dan Norman Jiwan (2010) Petani plasma adalah petani pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dimana petani peserta memperoleh kepemilikan lahan masing-masing 2 Ha/KK yang berupa hak milik secara penuh dan berdaulat, yang terintegrasi dalam satu kesatuan usaha berskala ekonomi sebagai plasma dengan perusahaan perkebunan besar sebagai inti. Petani non plasma (independen) kebebasan untuk memilih bagaimana menggunakan lahannya, tumbuhan mana yang ditanam dan bagaimana mengelolanya, mengatur sendiri, mengelola sendiri, dan mendanai sendiri, dan tidak secara kontrak terikat dengan pabrik manapun atau asosiasi manapun.

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu pilar perekonomian yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Program-program pemerintah untuk membangun masyarakat pedesaan, seperti distribusi pupuk, benih, dan perawatan. Koperasi Unit Desa mempunyai peran penting bagi masyarakat dan KUD, seperti penyaluran sarana produksi, pengadaan pangan, dan program pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan, memperkuat peran KUD dalam program ketahanan pangan dengan sistem pembinaan organisasi yang mengarah pada keswadayaan masyarakat dan anggota KUD, mengintegrasikan kelompok tani dan gabungan kelompok tani sebagai salah satu organ dalam struktur KUD, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam manajemen KUD melalui pendidikan perkoperasian dan pelatihan (Fani, 2011).

Menurut UU No.17 tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh seorang perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi (Pralita P, 2013).

Produksi TBS petani plasma diharapkan dapat menyamai produksi TBS kebun perusahaan dan lebih tinggi dari petani non plasma melalui pola kemitraan. Hal ini didasarkan bahwa sistem pengelolaan kebun petani plasma sudah menerapkan sistem pengelolaan kebun inti perusahaan yang sangat memperhatikan faktor-faktor pendukung produksi kebun. Faktor-faktor tersebut adalah faktor alam (tanah), modal, tenaga kerja, dan manajemen. Modal yang dimaksud adalah termasuk biaya untuk pembelian pupuk, pestisida, dan bibit. Mubyarto (1987) dan Soekartawi (1990) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi produksi dibedakan menjadi dua kelompok yakni : (1) faktor biologi seperti lahan pertanian dengan macam dan tingkat kesuburannya, varietas bibit, jenis pupuk, obat-obatan, gulma dan sebagainya, (2) faktor-faktor sosial ekonomi, seperti biaya produksi, harga, biaya tenaga kerja, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tersedianya kelembagaan kredit dan ketidakpastian.

Pola kemitraan yang dijalankan berupa PIR-KKPA (Perusahaan Inti Rakyat-Kredit Koperasi Primer Anggota), dimana pengelolaan kebun dilakukan secara bersama-sama oleh para petani peserta koperasi primer tersebut. Konsep dalam kemitraan ini yaitu saling membutuhkan dan menguntungkan secara berkesinambungan. Masyarakat yang mengelola kebunnya (petani plasma) memperoleh pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Sedangkan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku untuk diolah dan dikomersialisasikan agar memperoleh profit. Tingkat kesejahteraan keluarga petani secara ekonomi belum tentu dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Kesejahteraan pada hakekatnya terdiri dari dua dimensi yaitu kesejahteraan secara ekonomi dan secara sosial. Dengan mengacu pada definisi kesejahteraan tersebut dan manusia sebagai makhluk sosial maka pemerintah dalam hal ini BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) memberikan tahapan-tahapan kesejahteraan untuk mengukur tingkat kesejahteraan secara

sosial dan ekonomi yang sangat deskriptif dan mudah dipahami (Anonim, 2012).

Pengembangan kelapa sawit rakyat ini merupakan salah satu tujuan pemerintah karena di samping untuk menghasilkan devisa negara atau pendapatan negara juga memperluas kesempatan kerja dan sekaligus juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kelapa sawit di Indonesia dewasa ini merupakan komoditas primadona, luasnya terus berkembang dan tidak hanya merupakan monopoli perkebunan besar negara atau perkebunan besar swasta. Saat ini perkebunan rakyat sudah berkembang dengan pesat (Sugito, 1992).

Tingkat pendapatan dan tingkat keuntungan yang tinggi pada usaha kelapa sawit dapat diperoleh dengan memperhatikan bagaimana meningkatkan produksi dan kualitas buah yang tinggi. Untuk itu diperlukan pengadaan modal bagi petani untuk membuka lahan dan pembelian bibit unggul kelapa sawit yang bermutu tinggi agar hasilnya bagus dan pertumbuhannya sempurna. Dalam pembangunan kelapa sawit perlu juga diperhatikan ketersediaan tenaga kerja, tanpa adanya tenaga kerja maka perkebunan kelapa sawit tidak akan berjalan baik, tenaga kerja dari keluarga petani sendiri maupun dari luar (Soetrisno L, 1991).

Modal untuk mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat harus dipersiapkan sejak dini dan bersifat jangka panjang karena menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu relatif lama dan kondisi ekonomi yang baik. Modal digunakan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit jadi tidak hanya keperluan penyediaan lahan, biaya dan tenaga kerja, tetapi juga dalam meningkatkan pengetahuan petani melalui penyuluhan agar suatu usaha perkebunan kelapa sawit rakyat dapat berkembang dan mempunyai hasil yang dapat meningkatkan terhadap pendapatan petani plasma. Sehingga modal sangat menentukan berkembangnya suatu usaha petani perkebunan kelapa sawit (Mangoensoekarjo, 2003).

Tingkat pendapatan yang diterima oleh petani plasma pada dasarnya hanya dari

sumber tanaman pokok, yaitu hasil produksi kelapa sawit itu sendiri. Untuk memperoleh pendapatan yang tinggi belum berjalan atau belum berkembang suatu perkebunan petani plasma tanpa adanya peran lembaga ekonomi koperasi unit desa (KUD), karena penjualan produksi setiap kebun petani sebesar 30 % digunakan untuk angsuran kredit, biaya perawatan, biaya produksi, dan biaya perawatan akses sekitar 20 % sedangkan sisanya sebesar 50 % merupakan bagian dari petani plasma kelapa sawit, maka dengan adanya peran koperasi unit desa sangat membantu petani plasma kelapa sawit untuk mengembangkan hasil usahatannya (Sugito, 1992).

KUD merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri yang berguna untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Tugas-tugas KUD sebagai berikut : (1) Penyediaan, (2) Intensif produksi pada petani, (3) Pemasaran, (4) Pendidikan. Keanggotaan KUD adalah masyarakat pedesaan yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan pada umumnya adalah kepala keluarga dan KUD bermaksud dapat menumbuhkan swadaya serta meningkatkan potensi pedesaan yang berdaya guna dan berhasil guna (Sugito, 1992).

Koperasi sebagai jembatan antara petani plasma dan perusahaan dapat mempermudah dalam penyaluran sarana dan prasana khususnya dalam usaha petani plasma kelapa sawit (Pahan, 2006). Perkebunan kelapa Sawit bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan, di samping itu juga memperhatikan pemerataan perekonomian antar golongan dan antar wilayah. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat di sekitarnya.

## **METODOLOGI PENELITIAN METODE DASAR**

Metode penelitian ini menggunakan metode *analisis deskriptif*, yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013).

#### **METODE PENGAMBILAN SAMPEL**

##### a. Lokasi dan Waktu

Pemilihan lokasi dilakukan di Koperasi Unit Desa (KUD) Langgeng Unit Desa Giri Sako G Kecamatan Logas Tanah Darat, Kuantan Singingi PT. Citra Riau Sarana dari tanggal 05 September s/d 30 September 2015.

##### b. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah petani anggota KUD Langgeng Unit Perwakilan Desa Giri Sako yang diambil secara *purposive sampling* sesuai dengan status keanggotaan yaitu petani anggota yang sudah selama dua tahun menjadi anggota KUD sebanyak 30 responden.

#### **JENIS DATA YANG DIAMBIL**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petani plasma. Data primer terdiri atas bidang perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi TBS, kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
2. Data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data keadaan daerah, keadaan pertanian dan data penunjang lainnya.

#### **METODE PENGUMPULAN DATA**

##### 1. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diamati.

##### 2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi kepada petani sampel berdasarkan daftar penting yang telah disiapkan sebelumnya.

##### 3. Pencatatan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data yang telah ada dan berkaitan dengan tujuan penelitian.

#### **PEMBATASAN MASALAH**

Batasan masalah ini hanya ditujukan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan manajemen kebun anggota KUD Langgeng Unit Giri Sako, serta hubungan antara pihak Unit dengan petani anggota. Fasilitas dan kemudahan yang diberikan KUD Unit kepada petani anggota.

#### **KONSEPTUALISASI**

1. Peranan yang dilakukan KUD Langgeng Unit Giri Sako yaitu ditinjau dari pelayanan KUD seperti bidang perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi, pemasaran hasil, kegiatan penyuluhan dan pembinaan.
2. Petani sampel yang diambil adalah petani yang memiliki perkebunan kelapa sawit dan sebagai anggota KUD Langgeng Unit Giri Sako serta berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.
3. Produksi adalah hasil TBS yang diperoleh petani yang dinyatakan dalam satuan kilogram (kg).
4. Luasan lahan yang digunakan petani untuk kegiatan Perkebunan kelapa sawit baik lahan sendiri, atau milik orang lain yang diperoleh secara sewa, yang dinyatakan dengan satuan hektar (ha).
5. Pendapatan yang diterima petani plasma berasal dari penjualan hasil

produksi yang telah dikurangi biaya pengeluaran, dan kewajiban.

#### **METODE ANALISIS DATA**

Metode analisis yang digunakan adalah metode *analisis deskriptif* yaitu analisis yang menjelaskan atau menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dibantu penyajiannya dalam bentuk tabel maupun grafik dan metode pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, dalam penelitian ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan status keanggotaan petani anggota yang sudah selama dua tahun menjadi anggota koperasi dapat diketahui melalui data keanggotaan bahwa petani yang menjadi anggota sudah lebih dari dua tahun sejak persiapan pembangunan perkebunan kebun kelapa sawit tahun 1998.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Kemitraan KUD Langgeng dan PT. Citra Riau Sarana (PT. CRS)**

Latar belakang dibentuknya sistem kemitraan bagi PT. CRS dalam pengembangan masyarakat adalah dengan cara membentuk kepercayaan masyarakat, mengelola pengharapan masyarakat, dan menjalankan kompetensi serta pengembangan potensi masyarakat sekitar juga diperlukan untuk mengurangi konflik sosial. PT. CRS juga melakukan operasi simpatik seperti pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan di lingkungan perkebunan pada Wilayah transmigrasi di Taluk Kuantan I, II, dan III yang meliputi desa-desa di Kecamatan Benai, yaitu Desa Muara Langsat, Langsat Hulu, Marsawa dan Geringging Baru serta desa-desa di Kecamatan Kuantan Hilir, yaitu Desa Kuantan Sako, Sako Margasari, Sukaraja, Giri Sako dan Hulu Teso.

Wilayah transmigrasi Taluk Kuantan I, II dan III seperti tersebut di atas, pada awalnya diprogramkan oleh pemerintah untuk pertanian tanaman pangan (palawija) dan tidak dibenarkan untuk tanaman keras. Hal ini

ditandai dengan adanya bangunan bendungan irigasi serta saluran-saluran air yang ada pada masing-masing desa. Namun ditinjau dari kondisi lahan dan topografi tanah, tidak sesuai untuk tanaman pangan. Hal ini menimbulkan masalah baru, antara lain banyak lahan yang tidak produktif (lahan tidur), sehingga tingkat pendapatan rendah. Akibatnya sebagian besar masyarakat mencari pekerjaan lain ke luar daerah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilatarbelakangi hal tersebut KUD Langgeng bermitra dengan PT. CRS, serta atas dukungan dan persetujuan Instansi terkait berusaha mengatasi permasalahan di atas dengan membangun perkebunan kelapa sawit pola KKPA sekaligus membangun pabrik pengolahannya. Jangka waktu kerjasama antara PT. CRS dan KUD Langgeng berlaku saat perjanjian kemitraan ditandatangani sampai kebun kelapa sawit tidak menghasilkan tandan buah segar (TBS) lagi atau dalam jangka waktu  $\pm 25$  (dua puluh lima) tahun.

Pola pembangunan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) merupakan pola kemitraan untuk meningkatkan daya guna lahan petani anggota dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani anggota dengan kredit jangka panjang melalui pinjaman Bank. Dalam Pola kemitraan KKPA, PT. CRS bertanggungjawab atas pengembalian kredit Bank pada masa sebelum kebun diserahkan kepada KUD. Angsuran kredit diambil dari potongan hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari hasil panen kebun plasma. Oleh karena itu, petani wajib dan berhak menyerahkan penjualan hasil produksi kebun kepada PT. CRS yang wajib membeli TBS petani plasma karena pihak KUD Langgeng dan PT. CRS memiliki saham masing-masing sebesar 49 % dan 51 % di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) I Bumi Mulya.

Kemitraan yang dimulai sejak tahun 1981 ini sudah dilaksanakan dengan pembangunan kebun kelapa sawit seluas 10.000 ha yang dibangun dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Pada tahun 1998 dan 1999 dilakukan pembangunan kebun plasma tahap I seluas 5.000 ha dan pada tahun 2000

dilakukan pembangunan kebun plasma tahap

II seluas 5.000 ha dapat dilihat pada Tabel 4 :

Tabel 4. Kebun plasma KUD Langgeng

No	Unit Desa	Luas (ha)	Tahun tanam (ha)			Afd	Jml anggt (jiwa)	Jml Klp tani (klmpk)
			1998	1999	2000			
1	Bumi Mulya (D)	762	680,37	81,63	-	1	438	12
2	Kuantan Sako (C)	1.125	646,93	189,07	289	1	800	15
3	Giri Sako (G)	1.560	609,11	898,89	52	2	1.094	22
4	Sidodadi (F)	560	-	318,00	242	2	395	8
5	Hulu Teso	1.252	-	-	1.252	3	792	17
6	Muara Langsat	1.293	-	582,00	711	4	885	52
7	Marsawa	994	375,59	618,41	-	5	913	25
8	Geringging Baru	398	-	-	398	5	302	12
9	Teratak Sentajo	147	-	-	147	5	75	7
10	Geringging Jaya	383	-	-	383	5	327	11
11	Sentajo	774	-	-	774	6	460	8
12	Jake	752	-	-	752	6	918	5
<b>Total</b>		<b>10.000</b>	<b>2.312</b>	<b>2.688</b>	<b>5.000</b>		<b>7.399</b>	<b>194</b>

Sumber : KUD Langgeng, 2015

Tabel 4 menunjukkan kebun plasma seluas 10.000 ha yang terbagi menjadi 6 (enam) afdeling dengan jumlah anggota sebanyak 7.399 jiwa dan kelompok tani sebanyak 194 kelompok, dalam setiap afdeling terdapat satu assistent pembina dari PT. CRS.

Sebagai sampel penelitian, diambil satu sampel unit yaitu KUD Langgeng Unit

Perwakilan Desa Giri Sako (KUD Langgeng Giri Sako) dengan jumlah petani anggota sebanyak 1.094 jiwa dan 22 kelompok tani. KUD Langgeng Giri Sako mengelola kebun petani anggota di Desa Giri Sako seluas 1.560 ha yang terdiri dari kebun plasma tahap I tahun tanam 1998/1999 seluas 1.508 ha dikelola oleh 21 (dua puluh satu) kelompok tani dan kebun plasma tahap II tahun tanam

2000 seluas 52 ha yang dikelola oleh 1 (satu) kelompok tani.

Sako yang berdomisili di Desa Giri Sako Kecamatan Tanah Logas Darat sebanyak 30 (tiga puluh) jiwa, dengan identitas yang disajikan dalam tabel berikut :

**Identitas Petani**

Identitas petani dalam penelitian ini adalah petani anggota KUD Langgeng Giri

Tabel 5. Jenis Kelamin Petani Desa Giri Sako

Jenis Kelamin	Jumlah Petani (jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	24	80
Perempuan	6	20
Jumlah	30	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2015

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada umumnya petani anggota Desa Giri Sako sebagian besar laki-laki yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) jiwa dengan persentase

sebesar 80 % bila dibandingkan dengan banyaknya petani plasma wanita hanya sebanyak 6 (enam) jiwa atau persentase sebesar 20 %.

Tabel 6. Tingkat Umur Petani Desa Giri Sako

Umur (tahun)	Jumlah Petani (jiwa)	Persentase (%)
27 – 60	28	93,3
61 – 81	2	6,7
Jumlah	30	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2015

Tabel 6 menunjukkan usia petani anggota KUD Langgeng Giri Sako yang terbanyak adalah petani yang masih berusia produktif

yaitu petani yang masih mampu atau dapat meningkatkan usahataniya sebanyak 28 jiwa dengan persentase sebesar 93,3 %.

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Petani Desa Giri Sako

Tingkat Pendidikan	Jumlah Petani (jiwa)	Persentase (%)
Tidak Tamat SD	4	13,3
Tamat SD	15	50
Tamat SMP	8	26,7
Tamat SMA	3	10
Jumlah	30	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2015



Pendidikan petani anggota sangat berpengaruh terhadap kemampuan produktivitas petani plasma kelapa sawit. Dari Tabel 7 kebanyakan petani anggota adalah mereka yang berpendidikan tamat SD (sekolah dasar) yaitu sebanyak 15 responden atau sekitar 50 %. Dengan rendahnya tingkat pendidikan petani, maka KUD Langgeng Giri Sako berperan dalam mengembangkan potensi petani anggota dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan untuk petani anggota.

### **Peran KUD Langgeng Giri Sako**

Pola kemitraan ini, KUD Langgeng Giri Sako berperan membina petani anggota dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan kebun plasma. Berikut adalah peran KUD saat pembangunan kebun kelapa sawit:

#### **a) Tahap Persiapan Pembangunan kebun plasma**

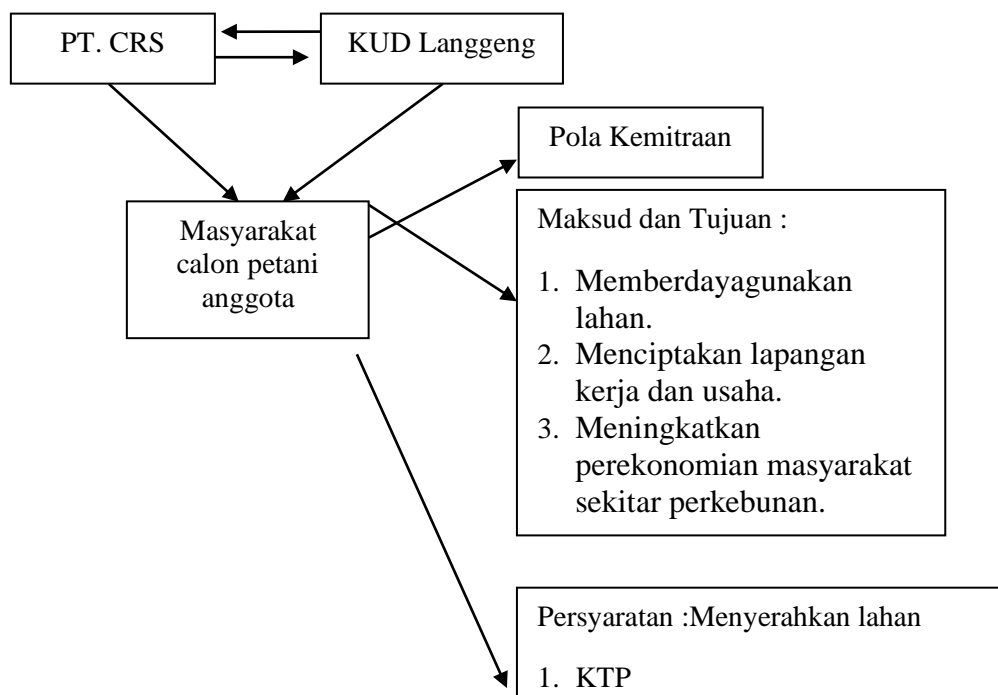
##### **1. Sosialisasi**

Pembangunan kebun plasma pada masa awal, perlu diadakan sosialisasi untuk kepentingan bersama. Sosialisasi yang dimaksud adalah memberikan penyuluhan sekaligus memperkenalkan sistem pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan sekaligus pengelolaan pendanaannya. Dalam hal ini KUD Langgeng bersama PT. CRS melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas masing-masing. PT. CRS berusaha merespon aspirasi masyarakat di wilayah yang akan dibangun perkebunan melalui survei desa dan pertemuan secara langsung dengan masyarakat. Sedangkan pihak KUD Langgeng berusaha mengajukan permohonan lokasi dan usaha berdasarkan kesepakatan masyarakat kepada Instansi pemerintahan terkait. Selanjutnya antara pihak PT. CRS dengan KUD Langgeng membuat suatu kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MOU) sebagai bentuk komitmen

kemitraan untuk mewujudkan program secara berdayaguna dan berhasil guna.

#### **2. Pendataan dan pendaftaran**

KUD Langgeng memberikan kesempatan kepada calon petani anggota yang berminat untuk menyerahkan lahan miliknya menjadi kebun kelapa sawit. Jika calon petani anggota setuju dan ingin mengikuti program yang dijalankan oleh KUD Langgeng dan PT. CRS maka calon petani anggota dapat mendaftarkan dengan syarat menyerahkan lahan yang dimiliki dan menyerahkan berkas yang diminta seperti KTP, dan surat nikah. Setelah syarat tersebut dipenuhi, KUD Langgeng akan melakukan pendataan lahan yang meliputi lahan bersertifikat, lahan belum bersertifikat serta lahan yang masih berstatus hak pakai lahan (HPL) agar mempermudah PT. CRS dalam hal pengecekan di lapangan dan pembangunan kebun kelapa sawit. Hal ini dilakukan untuk menghindari peluang terjadinya manipulasi data dari masyarakat. Maka pada lahan yang berstatus tanah ulayat harus disertai pernyataan masyarakat setempat yang disahkan ninik mamak dan disetujui oleh pemerintah daerah setempat serta instansi terkait lainnya. Berikut disajikan bagan tahap persiapan pembangunan kebun kelapa sawit pada Gambar 3:



Gambar 3. Bagan Persiapan Kemitraan (Sumber : Analisis Data Primer, 2015)

Gambar 3 menunjukkan bahwa PT. CRS dan KUD Langgeng bekerjasama untuk mempersiapkan pembangunan kebun masyarakat calon petani anggota. Dengan maksud dan tujuan yang jelas telah dipaparkan dalam sosialisasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. CRS dan KUD Langgeng maka masyarakat calon petani anggota harus melengkapi persyaratan tersebut.

Proses pendataan ini akan timbul permasalahan ataupun kendala yang harus dihadapi seperti masalah pada status lahan yaitu kepemilikan lahan dan sertifikat lahan yang tidak memadai atau terdapat kejanggalan perbedaan nama maupun luas lahan. Status lahan ini juga dapat menimbulkan permasalahan seperti tuntutan dari masyarakat mengenai tanah ulayat, dan status lahan yang didaftarkan lebih luas daripada kenyataannya.

Masalah dalam keanggotaan yang terjadi di Desa

Giri Sako ialah adanya anggota yang tidak berada di lokasi atau sudah pindah maupun telah meninggal dunia. Dalam keanggotaan ini juga terdapat anggota yang masih anak-anak dan anggota yang sudah lanjut usia serta anggota yang bukan berasal dari desa Giri Sako dan anggota yang memiliki lahan lebih dari ketentuan plafon yaitu seluas 4 (empat) ha.

Sulitnya mengumpulkan identitas anggota juga merupakan permasalahan yang dihadapi KUD dalam hal administrasi, tidak hanya identitas anggota saja yang menjadi masalah administrasi namun sulitnya meminta tanda tangan anggota, terlalu banyak petugas yang menangani KKPA dan kurangnya kerjasama antara pihak desa, KUD Langgeng dan PT. CRS juga menjadi permasalahan dalam kemitraan ini. Masalah terakhir yang dihadapi adalah permasalahan keuangan yaitu kurangnya kesadaran anggota untuk membayar

simpanan pokok dan simpanan wajib serta sulitnya menarik kembali pinjaman.

Permasalahan dan kendala lain yang terjadi dalam segi sosial dan lingkungan, yaitu Kurangnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap program yang dilakukan. Misalnya, banyaknya anggota yang tidak mau mengumpulkan persyaratan yang diminta, seperti KTP dan Surat Nikah dengan alasan sebelum lahan miliknya selesai dikerjakan dan adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Surat Nikah. Di samping itu, dalam hal pengerjaan kebun, tidak

dilakukan dengan baik adanya lahan yang rusak akibat kebakaran, maupun sengaja dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Adanya warga masyarakat yang sering melakukan demonstrasi dan main hakim sendiri dalam usaha memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Luasnya wilayah kerja KUD Langgeng juga mempengaruhi terhadap kelancaran pelaksanaan program, baik dalam hal administrasi, koordinasi dan komunikasi. Kendala yang terjadi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 8. Macam-macam kendala di Desa Giri Sako

No.	Jenis Kendala	Keterangan	Solusi	Keadaan Saat ini
1	Segi Pendataan lahan	Status Lahan	KUD memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat serta melalui kepala desa agar mampu mempersiapkan data seakurat mungkin mengenai data calon anggota, lahan rencana kebun, legalitas lahan, menghimbau petani anggota agar untuk melakukan pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib kepada KUD.	Terdapat Petani anggota yang tidak bertempat tinggal di desa Giri Sako, maka petani tersebut dikenakan biaya tambahan yang berhubungan dengan desa Giri Sako. Mengenai status lahan, sertifikat lahan belum dapat diterbitkan.
		Keanggotaan		
		Administrasi		
		Keuangan		

2	Segi Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup	Tidak adanya rasa memiliki dan banyaknya petani anggota yang tidak memiliki KTP dan surat nikah bahkan tidak mau mengumpulkan. Serta adanya lahan yang sengaja dirusak/dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat terjadi demonstrasi/main hakim sendiri dengan permasalahan yang ada.	KUD melakukan pendekatan kepada masyarakat dilingkungan proyek, memberikan bimbingan dan pengarahan (sosialisasi) melalui penyuluhan di tiap desa secara berkesinambungan. Merespon permasalahan yang disampaikan dan segera memberikan solusi. Untuk petani anggota yang tidak memiliki KTP dan surat nikah, pihak KUD meminta bantuan kepada KUA untuk pembuatan surat nikah dan membiayai pembuatan KTP.	Data yang diminta telah terkumpul dan terdaftar. Hubungan antara petani anggota dengan KUD dan sesama petani anggota terlihat harmonis dan saling terbuka.
3	Segi Tenaga Kerja	Kurangnya tenaga kerja harian untuk pengerjaan kebun, baik kuantitas maupun kualitas.	Melibatkan anggota masyarakat sebagai tenaga kerja dan melakukan penyuluhan serta pelatihan ( <i>job trining</i> ).	Pembangunan sudah terealisasi seluas 10.000 ha.
4	Segi Perekonomian	Pencairan dana pembangunan tidak relevan sehingga dilakukan penambahan dana (eskalasi).	Memberikan pemahaman kepada petani anggota pemilik lahan agar memahami dan menyadari keadaan yang sebenarnya.	Petani anggota telah setuju, pembangunan telah dilaksanakan dan dilakukan pelunasan kredit setiap bulannya.
5	Segi Pengelolaan Dana	Penggabungan biaya proyek dengan biaya non proyek.	Pemisahan biaya antara biaya proyek dengan biaya KUD sebelumnya.	Dana sudah terkendali dan jelas.

Sumber : Analisis Data Sekunder, 2015

Tabel 8 menunjukkan kendala yang harus dihadapi KUD Langgeng Giri Sako dalam pola kemitraan ini.

Oleh karena itu KUD Langgeng harus bekerjasama dengan perangkat desa untuk menyelesaikan permasalahan

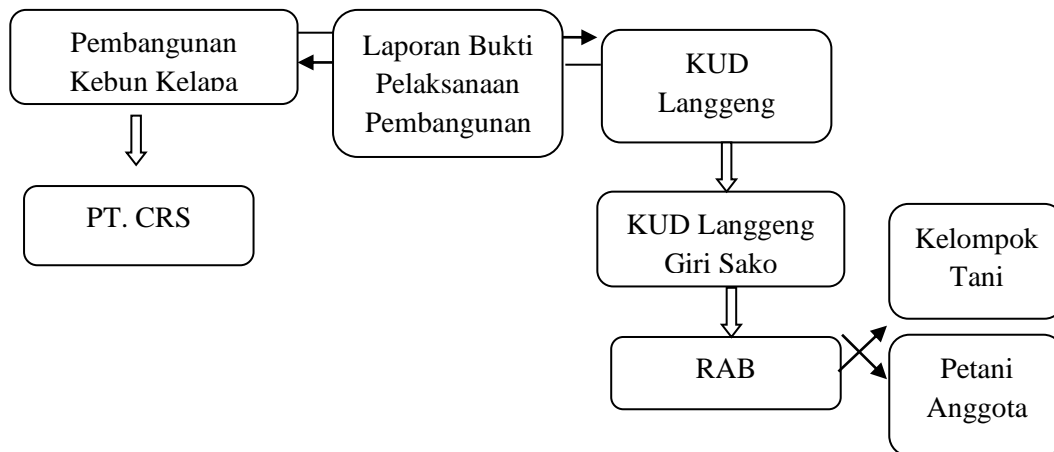
yang ada. Perangkat desa / kepala desa diharapkan mampu mempersiapkan data seakurat mungkin mengenai data calon petani anggota, lahan rencana kebun dan legalitas lahan. Sosialisasi secara terus-menerus juga perlu dilakukan pihak KUD Langgeng Giri Sako untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat calon petani anggota dalam melengkapi persyaratan pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA agar calon petani anggota lebih memahami program yang sedang dijalankan. Pada saat ini, kebun plasma sudah lunas sejak tahun 2013 dan penerbitan sertifikat belum dapat diterbitkan karena petani anggota tidak mengakui lahan miliknya jika tidak sesuai dengan luas yang tertera di sertifikat. Luas lahan yang akan dibuat

adalah luas lahan yang telah dipotong untuk jalan.

**b) Tahap Pelaksanaan pembangunan Kebun Plasma**

Pembangunan kebun plasma yang diserahkan seluruhnya kepada PT. CRS sesuai dengan perjanjian kemitraan KKPA. Pihak KUD Langgeng wajib menerima pelaksanaan pembangunan kelapa sawit milik petani anggota dan berhak meminta laporan pertanggungjawaban pembangunan kebun kelapa sawit sebagai bukti bahwa pembangunan dilaksanakan dan berhak melakukan pengecekan maupun mengawasi pekerjaan di lapangan secara langsung untuk menyesuaikan dengan laporan yang dibuat oleh PT. CRS. Dapat dilihat pada Gambar 4 pelaksanaan pembangunan.

Gambar 4. Pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit



(Sumber : Analisis Data Primer, 2015)

Gambar 4 menunjukkan bahwa setiap rapat anggota bulanan (RAB), KUD Langgeng Giri Sako akan memberikan informasi mengenai kebun milik anggota yang sedang dalam proses pembangunan. Perkembangan pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit milik petani anggota akan disampaikan setiap bulannya dari hasil pengecekan di lapangan dan dari laporan bukti pelaksanaan

pembangunan dari PT. CRS. Pada tahap pembangunan ini, PT. CRS membebaskan biaya tidak langsung kepada KUD Langgeng sebesar 5 % yang akan dipotong setelah tanaman menghasilkan untuk biaya *Land clearing*, penanaman *Cover crop*, biaya pemeliharaan dari tahun ke 0 (nol) sampai dengan tahun dan penyediaan prasarana. Mengenai penggunaan bibit, PT. CRS menggunakan bibit kelapa sawit

dengan varietas mariat yang merupakan varietas dengan produktivitas yang tinggi dan baik menurut PT. CRS.

PT. CRS memberikan kesempatan kepada pihak KUD untuk petani anggota jika membutuhkan pekerjaan. Petani anggota akan di bayar / diberi upah sesuai dengan upah minimum menurut ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Riau.

**c) Tahap akhir pembangunan kebun plasma**

Tahap akhir pembangunan kebun kelapa sawit ini dilakukan kegiatan sosialisasi kepada petani anggota mengenai penataan kapling dan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh PT. CRS. Penataan kapling dilakukan sesuai dengan letak lahan per desa. Kemudian KUD Langgeng Giri Sako akan membentuk kelompok tani yang berasal dari petani anggota Giri Sako sebagai wadah KUD untuk mempersatu antara pihak KUD dengan petani anggota.

KUD Langgeng Giri Sako akan mengenalkan kepada petani anggota mengenai sistem pembayaran kredit yang wajib dibayar oleh petani anggota pada saat tahun kelima pembangunan kebun kelapa sawit atau pada saat tanaman menghasilkan (TM). Petani anggota berhak dan wajib mengikuti pelatihan yang diadakan, mengenai pengaturan panen sesuai dengan ketentuan dari PT. CRS yaitu memenuhi kriteria TBS matang sebagai berikut :

1. TBS membrondol lepas secara alami dengan jumlah satu brondol per kilogram (kg) TBS di Tempat Penampungan Hasil (TPH).
2. Kulit buah berwarna merah kekuning-kuningan.
3. Daging buah berwarna merah kekuning-kuningan.

Pihak KUD Langgeng dengan PT. CRS juga memberikan informasi berbentuk papan spanduk kriteria TBS matang di setiap pondok informasi yang dibangun oleh KUD Langgeng sebagai pusat informasi kebun plasma yang terdapat di setiap afdeling. Informasi yang terdapat di pondok informasi yaitu mengenai informasi kegiatan berkelompok tani, harga TBS dalam satu bulan, rotasi panen, budget dan realisasi produksi dalam satu tahun setiap bulan.

Kebun plasma pola kemitraan KKPA ini dikelola oleh PT. CRS dengan pembagian SHU pada saat tanaman mulai menghasilkan (TM) 35:35:30 yaitu 35 % dari SHU dipotong untuk pembayaran kredit kepada Bank, 35 % dari SHU dipotong untuk biaya perawatan kebun dan 30 % merupakan SHU yang diterima oleh petani anggota. Dengan pembagian SHU seperti ini, petani anggota merasa tidak puas dengan SHU yang diterima setiap bulannya. Maka petani anggota bersama kelompok tani berkoordinasi untuk meminta kepada KUD Langgeng agar perawatan kebun seluruhnya dilakukan oleh petani anggota sendiri atau disebut dengan swakelola.

KUD Langgeng bersama PT. CRS melakukan perundingan perubahan perjanjian, dan hasil yang diterima oleh petani anggota sesuai dengan harapan dan tetap saling menguntungkan. Kebun plasma dikelola oleh petani anggota sendiri dengan bantuan KUD Langgeng dengan ketentuan tetap memberikan hasil yang terbaik untuk PT. CRS. Pembayaran kredit KKPA dilakukan oleh pihak KUD sesuai dengan plafon sisa kredit yang diberikan oleh Bank. Petani anggota akan menerima SHU setelah pemotongan biaya yang dilakukan oleh KUD Langgeng dan bersedia membayar biaya *management fee* sebesar 6,2 % untuk biaya operasional perusahaan. Berikut dijelaskan peran KUD Langgeng Giri Sako pada masa TM kebun petani anggota di Desa Giri Sako :

**1. Perkreditan**

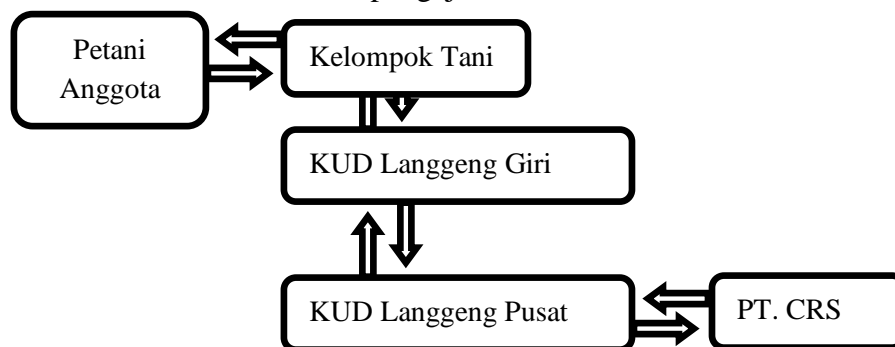
Modal awal koperasi berasal dari simpanan yang dibayar oleh anggota, sebagai petani anggota harus membayar simpanan pokok yang harus dibayar saat pertama kali menjadi anggota dan hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota dengan jumlah Rp. 10.000,-/anggota (sepuluh ribu rupiah) dapat diambil ketika sudah tidak menjadi anggota. Kemudian membayar simpanan wajib setiap bulannya sebesar Rp. 1.000,-/ anggota (seribu rupiah) dan tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota. Untuk simpanan sukarela, di KUD Langgeng Giri Sako selama ini belum aktif / tidak ada.

KUD Langgeng Giri Sako menyediakan modal pinjaman berupa Unit Simpan Pinjam (USP) untuk membantu petani anggota yang kekurangan atau membutuhkan dana untuk perawatan kebun. Besar pinjaman yang ditentukan oleh KUD Langgeng Pusat adalah maksimal

sebesar Rp. 5.000.000,- / ha, jangka waktu satu tahun dengan bunga 1,25 % setiap bulan. Pinjaman yang ditentukan tidak terlalu besar karena pembayaran kredit ini dipotong setiap bulan dari sisa hasil usaha (SHU) petani anggota oleh KUD Langgeng Pusat. Jika terlalu besar, maka petani anggota akan mendapatkan SHU sedikit karena potongan perbulan yang banyak.

KUD Langgeng melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai pengadaan USP melalui RAB. Sosialisasi ini dilakukan agar petani anggota dapat memahami tentang aturan peminjaman USP. Untuk memperoleh USP, petani anggota melapor kepada kelompok tani yang selanjutnya petani anggota mengisi formulir pengajuan kredit yang akan diserahkan kepada pengurus KUD Langgeng Giri Sako kemudian direkomendasikan ke KUD Langgeng Pusat dapat dilihat pada Gambar 6 tentang prosedur pengajuan kredit.

Gambar 5. Prosedur pengajuan kredit USP



(Sumber : Analisis Data Primer, 2015)

Gambar 5 menunjukkan bahwa pengajuan kredit harus melalui kelompok tani masing-masing petani anggota agar dapat diproses oleh pihak KUD Langgeng dan petani anggota mendapatkan kredit yang diajukan. Melalui kelompok Tani, Petani anggota mengisi formulir pengajuan kredit

yang kemudian diserahkan ke KUD Langgeng Giri Sako oleh kelompok tani. KUD Langgeng akan menerima dan melakukan pengecekan terhadap formulir yang telah diisi yang kemudian disesuaikan dengan data pinjaman petani anggota apakah masih memiliki tanggungan kredit pinjaman atau tidak di KUD

Langgeng. Jika tidak, maka petani anggota berhak mendapatkan pinjaman dan formulir dapat di ajukan ke KUD Langgeng Pusat untuk pencairan dana oleh PT. CRS. Dana pinjaman dari PT. CRS akan diserahkan ke KUD Langgeng Pusat yang kemudian diserahkan ke KUD Langgeng Giri Sako dan diserahkan

ke petani anggota melalui kelompok tani.

Menurut petani anggota, cara untuk memperoleh kredit ini mudah dapat dilihat pada Tabel 9 karena petani anggota hanya mengisi formulir pengajuan kredit yang kemudian diserahkan kepada kelompok tani.

Tabel 9. Respon petani terhadap syarat & pencairan kredit

No.	Kategori	Petani (jiwa)	Persentase (%)
1	Mudah	30	100
2	Sulit	0	0
3	Tidak tahu	0	0
Jumlah		30	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2015

Tabel 9 menunjukkan tanggapan petani anggota terhadap syarat dan pencairan kredit, 100 % petani anggota mengatakan mudah. Hal ini dikarenakan kejelasan dari

KUD Langgeng Giri Sako dalam penyampaian program perkreditan yang dilaksanakan dan adanya kelompok tani yang membantu petani anggota.

Tabel 10. Macam-macam kredit di KUD Langgeng Giri Sako

No	Jenis Kredit	Plafon (Rp)	Bunga/bulan (%)	Keterangan
1	KKPA	14.474.168	14	Pemotongan SHU
2	USP	5.000.000	1,25	Pinjaman max 5jt/ha
3	Pupuk	500.000	-	Dilakukan pemotongan SHU petani anggota/tabungan.

Sumber : Analisis Data Primer, 2015

Macam-macam kredit yang ada di KUD Langgeng Giri Sako dapat dilihat pada Tabel 10, setiap kredit dibayar dari SHU petani anggota yang bersangkutan, kredit KKPA yang merupakan kredit untuk pembangunan kebun kemitraan ini dibayar setiap bulannya dari SHU petani anggota melalui KUD Langgeng Pusat dengan bunga 14 % hingga kredit lunas.

KUD Langgeng Giri Sako menyediakan pinjaman USP untuk

membantu petani anggota jika membutuhkan modal dalam perawatan kebun kelapa sawit. USP disediakan untuk petani anggota agar tidak mengalami kesulitan jika meminjam melalui Bank maupun rentenir. Sedangkan untuk kebutuhan pupuk, petani anggota dapat menabung setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,-/bulan sebelum kegiatan pemupukan dilakukan atau berupa pinjaman yaitu meminta pupuk terlebih dahulu dan kemudian



KUD Langgeng Giri Sako akan memotong dari SHU sebesar Rp. 500.000,-/bulan. Kredit ini dapat diperoleh petani anggota sama halnya dengan pengajuan kredit USP melalui kelompok tani dengan mengisi formulir permintaan pupuk yang kemudian diserahkan oleh KUD Langgeng untuk ditindaklanjuti oleh KUD Langgeng Pusat.

**2. Saprodi**

Pembangunan kebun kelapa sawit plasma dilakukan oleh PT. CRS sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penyediaan bibit tentunya disediakan oleh PT. CRS dengan varietas bibit mariat yang memiliki produktivitas tinggi. Pihak KUD Langgeng menerima pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh PT. CRS dan meminta bukti pertanggungjawaban

pembangunan kebun kelapa sawit setiap akhir triwulan.

Perawatan kebun dilakukan oleh petani anggota dengan bantuan kelompok tani dilapangan. Untuk kegiatan pemupukan, KUD Langgeng Giri Sako menyediakan pupuk sesuai dengan rekomendasi dari PT. CRS dari hasil *Leaf Sampling Unit* (LSU) kebun plasma yang dilakukan enam kali dalam satu tahun. Dengan adanya kebutuhan pupuk, KUD Langgeng Giri Sako mendirikan gudang pupuk untuk penyimpanan pupuk serta pestisida untuk kebun petani anggota.

Pemupukan di Desa Giri Sako dilakukan enam kali dalam satu tahun, dan diawasi oleh kelompok tani serta assistent afdeling. Berikut adalah tabel rekomendasi pupuk di Desa Giri Sako.

Tabel 11. Rekomendasi Pupuk Desa Giri Sako

No.	Jenis Pupuk	Dosis (kg)	Aplikasi/tahun
1	Borate	0,1	1 kali
2	KCL	2	2 kali
3	Kiserite	1,5	1 kali
4	NPK Super King	2,5	2 kali

Sumber : Analisis Data Primer, 2015

Tabel 11 menunjukkan jenis pupuk yang direkomendasikan oleh PT. CRS terdapat empat jenis pupuk yaitu pupuk Borate dengan dosis 0,1 kg/pokok, Kiserite dengan dosis 1,5 kg/pokok yang diaplikasikan satu kali dalam satu tahun, pupuk KCL dengan dosis 2 kg/pokok dan NPK Super King dengan dosis 2,5 kg/pokok yang diaplikasikan dua kali dalam satu tahun.

KUD Langgeng Giri Sako juga menyediakan pestisida jika kebun anggota terserang hama dan penyakit, penyediaan pupuk dan pestisida ini dilakukan agar petani anggota memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan dan dapat

dibayar kredit, petani anggota tidak akan mengalami kesulitan dalam pembelian dan tidak sembarang membeli pupuk dan pestisida di tempat lain.

Petani anggota diberi kebebasan oleh KUD Langgeng Giri Sako jika ingin membeli pupuk dan atau pestisida di tempat lain. Namun, dalam hal ini petani anggota menganggap bahwa perawatan kebun juga bebas mereka lakukan tanpa koordinasi dengan pihak KUD seperti menyemprot total lahan miliknya. Bagi petani anggota, semprot total akan memudahkan mereka melakukan kegiatan rawat maupun panen tanpa menyadari dampak buruk pada tanaman dan

lahan. Pihak KUD Langgeng harus segera mengambil tindakan dengan memberikan pemahaman kepada petani anggota tentang permasalahan yang akan dihadapi karena perlakuan lahan dengan cara semprot total. Tindakan ini dapat dilakukan oleh kelompok tani yang langsung memberikan pemahaman di lahan maupun melalui RAB.

**3. Tenaga Kerja**

Tenaga kerja yang disediakan oleh KUD Langgeng Giri Sako hanya tenaga kerja dalam kegiatan

panen kebun plasma melalui kelompok tani, namun KUD memberikan kebebasan kepada petani anggota dalam pengadaan tenaga kerja. Melihat kenyataan dilapangan, pada saat panen sangat dibutuhkan tenaga kerja untuk timbang dan muat serta pemotongan tangkai panjang karena tidak memungkinkan untuk petani anggota dalam mengerjakan hal ini yang akan memakan waktu terlalu lama untuk pengiriman TBS ke PKS I Bumi Mulya.

Tabel 12. Tenaga Kerja yang disediakan KUD melalui kelompok tani

No.	Tenaga Kerja	Upah per kg (Rp)	Keterangan
1	Panen	100	Potong hasil penjualan TBS setiap bulan
2	Timbang	8	
3	Potong Tangkai panjang	75	

Sumber : Analisis Data Primer, 2015

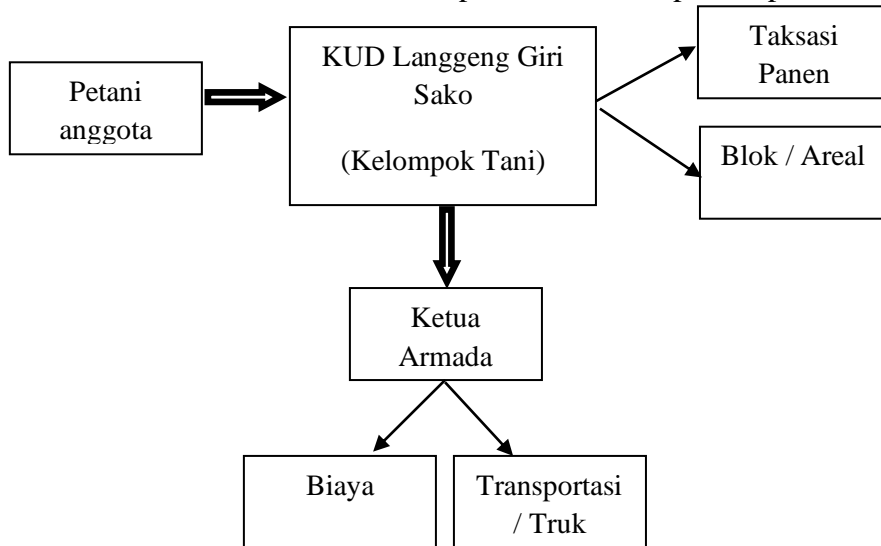
Tabel 12 adalah tenaga kerja yang disediakan oleh kelompok tani pada kegiatan panen TBS, petani anggota dapat melakukannya sendiri dan atau dengan bantuan tenaga kerja lainnya baik melalui kelompok tani maupun mencari tenaga kerja sendiri. Tenaga kerja dari kelompok tani akan dibayar dengan upah Rp. 100,-/kg (seratus rupiah) yang dibayar oleh petani anggota sendiri. Petani anggota juga akan dikenakan biaya tambahan atau pemotongan SHU setiap bulan sebesar Rp. 8,-/kg untuk biaya timbang dan pemotongan sebesar Rp. 75,-/kg untuk biaya pemotongan tangkai panjang. Panen dilakukan dua kali dalam satu bulan, dan diawasi oleh kelompok tani sebagai pencatat hasil panen setiap kebun milik petani anggota dan diawasi oleh assistent afdeling untuk mengetahui mutu buah yang dipanen oleh petani.

**4. Transportasi Pengangkutan TBS**

Sebelum kegiatan panen dilaksanakan, kelompok tani harus

menyediakan transportasi untuk pengangkutan TBS dari kebun ke PKS I Bumi Mulya. Dalam hal ini kelompok tani akan meminta bagian ketua armada untuk menyediakan transportasi pada esok hari di kebun yang akan panen. KUD Langgeng Giri Sako membentuk koordinasi armada yang bertanggungjawab dalam tugas penyediaan transportasi pengangkutan TBS plasma Desa Giri sako. Penyediaan transportasi ini dilakukan agar petani anggota tidak kesulitan dalam pengangkutan TBS. Biaya transportasi dipotong dari hasil penjualan produksi sesuai dengan jarak maupun medan tempuh. Jika jarak yang ditempuh dekat dan medan yang baik maka dikenakan biaya Rp. 71,-/kg (tujuh puluh satu rupiah), jika jarak yang ditempuh jauh maka dikenakan biaya Rp. 72,-/kg (tujuh puluh dua rupiah), dan jika jarak yang jauh serta medan yang tidak bagus maka dikenakan biaya Rp. 74,-/kg (tujuh puluh empat rupiah).

Gambar 6. Proses permintaan transportasi panen



(Sumber : Analisis Data Primer, 2015)

Gambar 6 menunjukkan proses permintaan transportasi untuk pengangkutan TBS dari kebun ke PKS. Sebelum panen dilakukan, petani anggota memberitahu kepada kelompok tani untuk meminta kebutuhan truk untuk pengangkutan esok hari. Kelompok tani akan melihat dari perkiraan tonase dan areal kebun petani anggota sehingga kelompok tani dapat menentukan banyaknya truk yang akan diminta kepada ketua armada. Ketua armada akan menentukan biaya sesuai dengan areal / medan tempuh dari kebun ke PKS dan kemudian menyediakan truk yang diminta untuk petani anggota.

Kelompok tani harus menyerahkan Surat Pengantar Buah (SPB) sebelum TBS diangkut agar TBS dapat masuk di PKS I untuk diproses. Jika Pengiriman TBS ke PKS tidak dapat langsung masuk atau dalam satu hari tidak dapat masuk ke pabrik / diolah, yang mengakibatkan TBS harus menginap yang disebabkan oleh kapasitas olah yang tidak memadai sehingga tonase TBS akan turun dan kadar asam lemak bebas (FFA) akan meningkat. Kapasitas olah tidak memadai karena

hasil produksi setiap panen kebun plasma lebih banyak daripada target kapasitas olah di PKS I yaitu 30 ton/jam atau 600 ton/hari. Hal ini dapat merugikan petani anggota karena TBS yang mengantri menyebabkan tingginya kandungan Asam Lemak Bebas (ALB) yang akan berakibat pada penghasilan petani anggota. Maka dari itu, KUD mengadakan perundingan dengan pihak PT. CRS mengenai hal ini dengan hasil bahwa pada tahun 2016 direncanakan kapasitas olah TBS menjadi 45 ton/jam atau 900 ton/hari.

##### 5. Penjualan TBS

Penjualan TBS plasma Giri Sako dilakukan oleh KUD Langgeng Giri Sako di PKS I Bumi Mulya PT. CRS. KUD merekomendasikan untuk menyertakan Surat Pengantar Buah (SPB) yang telah diisi oleh kelompok tani sebelum membawa TBS ke PKS khusus bagi petani anggota plasma. Harga TBS plasma mengikuti periode ketentuan harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau, maka harga TBS dalam satu bulan tidak tetap atau berubah-ubah. Semakin tinggi harga TBS / kg maka semakin tinggi hasil yang akan diterima oleh

petani anggota, berikut adalah Tabel 13 mengenai daftar harga TBS/kg

dalam satu bulan (satu periode) :

Tabel 13. Harga TBS Plasma periode september 2015

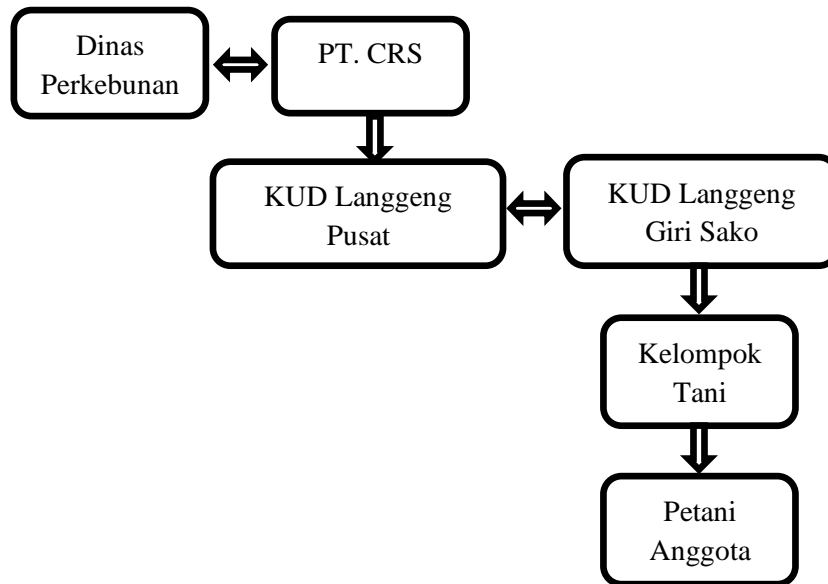
No.	Tanggal	Harga TBS (Rp)	Keterangan
1	01 s/d 08	1.104,44	Ditentukan oleh Disbun
2	09 s/d 15	1.155,46	
3	16 s/d 22	1.227,75	
4	23 s/d 39	1.259,52	
Rata-rata		1.186,82	

Sumber : Analisis Data Sekunder, 2015

Tabel 13 menunjukkan bahwa harga TBS dalam satu bulan tidak tetap atau berubah-ubah menurut ketentuan harga Disbun, karena mengikuti harga minyak kelapa sawit

dan rendemen pada saat ini. Dapat dirata-rata bahwa harga TBS dalam satu bulan sebesar Rp. 1.186,82 / kg. Berikut bagan proses pemberitahuan harga TBS ke Petani anggota.

Gambar 7. Bagan Proses penyampaian harga TBS ke petani anggota



(Sumber : Analisis Data Primer, 2015)

Gambar 7 menunjukkan bahwa pihak PT. CRS bersama dengan Disbun berkoordinasi dalam pemberitahuan harga TBS terkini. Pihak disbun telah menentukan harga dengan menyesuaikan harga minyak kelapa sawit saat ini. Semakin tinggi harga minyak maka akan semakin tinggi harga TBS namun sebaliknya jika harga minyak rendah maka

harga TBS juga rendah. PT. CRS akan segera memberi keterangan perubahan harga kelapa sawit disetiap periode kepada KUD Langgeng Pusat jika harga TBS sudah sesuai dengan harga minyak kelapa sawit kemudian disampaikan kepada KUD Langgeng Giri Sako, dalam hal ini semua pihak harus mengetahui perkembangan harga

minyak kelapa sawit. KUD Langgeng Giri Sako akan menyampaikan informasi harga TBS kepada petani anggota melalui kelompok tani dan menuliskan jelas dipapan informasi. Dengan tidak tetapnya harga TBS atau mengalami turun naik harga setiap bulannya terjadi perubahan, maka melalui RAB KUD Langgeng Giri Sako akan memberikan pemahaman kepada petani anggota agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik.

**6. Penyuluhan dan pelatihan**

Penyuluhan dan pelatihan sangat dibutuhkan untuk petani anggota agar dapat mengembangkan potensi petani anggota sehingga dapat merawat dan memanen kebun dengan benar. Dalam hal ini, KUD Langgeng Giri Sako berkewajiban

dalam pengadaan Penyuluhan dan pelatihan untuk petani anggota karna petani anggota berhak dan wajib untuk mengikuti kegiatan ini. Penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh pihak KUD Langgeng Giri Sako di lapangan maupun sesuai dengan Rekomendasi dari PT. CRS. Bentuk penyuluhan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan petani anggota melalui RAB maupun pemberian penyuluhan di lapangan langsung melalui assistent dan kelompok tani. Proses Pengadaan penyuluhan dan pelatihan dapat dilihat pada Gambar 9 serta Macam-macam penyuluhan dan pelatihan yang diberikan untuk petani anggota dapat dilihat pada Tabel 14 :

Gambar 8. Bagan pengadaan penyuluhan dan pelatihan



(Sumber : Analisis Data Primer, 2015)

Gambar 8 menunjukkan bahwa penyuluhan dan pelatihan yang diberikan kepada petani anggota sesuai dengan keadaan di lapangan yang sebelumnya telah dilakukan pengamatan oleh PT. CRS

melalui assisten pembina plasma yang kemudian dilakukan evaluasi untuk menentukan materi yang akan disampaikan pada penyuluhan dan pelatihan.

Tabel 14. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan

No.	Penyuluhan/pelatihan	Pelaksana	Keterangan
1.	Pemupukan kelapa sawit	Assistent Afdeling dan kelompok tani	Penyuluhan dilakukan karena telah dilakukan pengamatan di lapangan yang masih ditemukan petani anggota kurang memahami tentang tata cara pemupukan yang baik. Maka penyuluhan ini diterangkan dan diperagakan kepada petani anggota.
2.	Perawatan Jalan	Assistent Afdeling dan kelompok tani	Mempermudah kegiatan dikebun
3.	Pengendalian Gulma, hama & penyakit	Assistent Afdeling dan kelompok tani	Melatih petani anggota untuk paham dan merawat kebun dengan baik dan mengatasi adanya gulma dan serangan hama serta penyakit tanaman.
4.	Rotasi Panen	Assistent Afdeling dan kelompok tani	Mengajarkan petani anggota untuk menentukan rotasi panen
5.	Kualitas TBS	Assistent Afdeling dan kelompok tani	Petani anggota dapat memanen TBS dengan benar
6.	Pengutipan brondolan	Assistent Afdeling dan kelompok tani	Brondolan di lahan harus di kutip untuk menghindari kerugian yang akan terjadi
7.	Pemotongan Tangkai Panjang	Assistent Afdeling dan kelompok tani	TBS yang dikirim ke PKS tidak boleh bertangkai panjang
8.	Pemberian SPB dan pengawalan TBS ke PKS	Assistent Afdeling dan kelompok tani	Untuk menandai TBS plasma dan menghindari adanya pencurian atau penitipan buah.
9.	Susun pelepah dan pruning	Assistent Afdeling dan kelompok tani	Petani anggota dapat meng aplikasikan penyusunan pelepah yang semula ditemukan dilapangan banyak pelepah yang dibuang sembarangan dan melakukan pruning.
10.	Potong tangkai panjang	Assistent Afdeling dan kelompok tani	Petani anggota paham dampak dari adanya tangkai panjang dan melakukan pemotongan tangkai panjang TBS pada saat panen

11.	Penyuluhan Tambahan	Assistent Afdeling dan kelompok tani	Sesuai Pengamatan dilapangan
-----	---------------------	--------------------------------------	------------------------------

Sumber : Analisis Data Primer, 2015

Tabel 14 menunjukkan bahwa penyuluhan dan pelatihan dilakukan oleh pihak PT. CRS dan KUD untuk kepentingan bersama. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di KUD, areal kelompok tani, pondok informasi maupun dikebun petani anggota.

### 7. Pendapatan

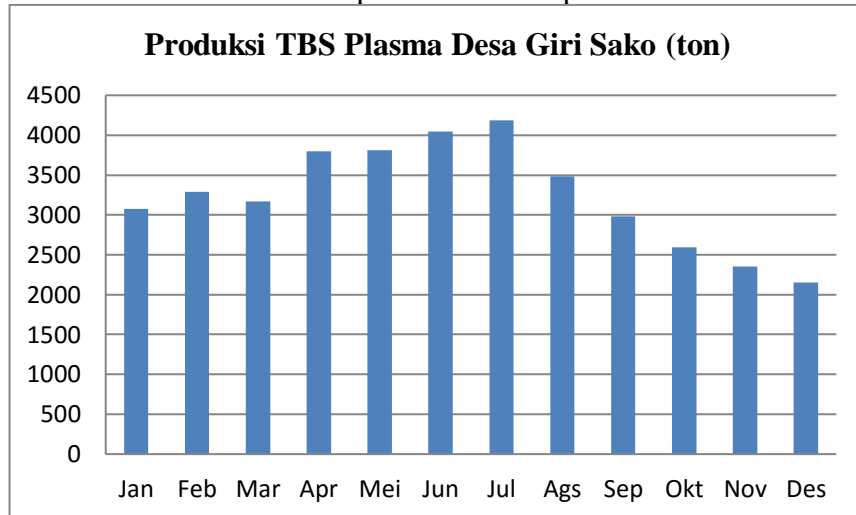
Pendapatan petani plasma diperoleh dari hasil penjualan TBS, yang dilakukan oleh KUD Langgeng Giri Sako. Hasil penjualan TBS tidak langsung diberikan kepada petani, karena harus dilakukan pemotongan hasil penjualan terlebih dahulu. Pemotongan awal dilakukan oleh PT. CRS dan KUD Langgeng Pusat berupa potongan biaya *management fee* sebesar 6,2 % dari hasil penjualan TBS plasma yang terdiri dari 2,5 % untuk biaya operasional perusahaan, 3,7 % untuk biaya operasional KUD Langgeng dan kelompok tani (1,25 % biaya opr. KUD Langgeng, 0,75 % biaya opr. KUD Unit, 1,5 % opr. Kelompok tani, dan 0,2 % biaya pembangunan desa). Dari hasil pemotongan biaya tersebut, kemudian dilakukan pemotongan untuk pembayaran kredit KKPA serta bunganya kepada pihak Bank. KUD Langgeng pusat berkewajiban untuk membayar angsuran kredit kepada bank setiap bulan sesuai dengan plafon sisa kredit yang diberikan oleh pihak bank.

KUD Langgeng Giri Sako akan menerima hasil penjualan TBS / SHU petani anggota Giri Sako setelah dilakukan pemotongan SHU oleh KUD Langgeng Pusat. KUD Langgeng Giri Sako, akan dilakukan pemotongan biaya per kelompok tani sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan petani plasma seperti potongan kredit pupuk, transportasi, tenaga kerja, iuran *replanting*, biaya operasional kelompok tani dan potongan kredit USP.

Kelompok tani akan membuat slip Sisa Hasil Usaha (SHU) jelas dengan potongan yang telah dilakukan oleh pihak KUD untuk kepentingan desa dan perawatan areal, biasanya petani anggota akan dikenakan potongan biaya umum seperti Dana sosial, akomodasi gaji, infaq masjid, infaq MDA, bantuan kecamatan, biaya perawatan jembatan dan alat berat.

KUD Langgeng Giri Sako mengupayakan agar pendapatan petani tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari petani anggota dengan tetap menghimbau petani anggota untuk tetap merawat dan memanen kebunnya dengan baik untuk hasil yang tinggi. Rata-rata produksi kebun petani anggota Desa Giri Sako dalam satu tahun.

Gambar 9 : Grafik produksi kebun plasma Giri Sako



(Sumber : Analisis Data Primer, 2015)

Grafik pada Gambar 9 dapat dilihat hasil produksi kebun plasma

tahap I dan tahap II di Desa Giri sako pada tahun 2015.

Tabel 15. Rata-rata produksi kelompok tani dalam sebulan

No.	Kelompok Tani	Luas lahan (ha)	Produksi (kg)	Rata-rata/ha (kg)
1	Tani Sejahtera	57	144.362	2.533
2	Jasa Citra	55	133.717	2.431
3	Sumber Mulyo	89	203.586	2.287
4	Tunas Harapan	81	176.012	2.173
5	Setia Tani	61	137.657	2.257

Lanjutan Tabel 15. Rata-rata produksi kelompok tani dalam sebulan

6	Sumber Rejeki	73	190.525	2.610
7	Suka Maju	74	172.326	2.329
8	Karya Madya	68	152.819	2.247
9	Jaya Mandiri	71	160.270	2.257
10	Sumber Jaya	114	225.995	1.982
11	Gotong Royong 1	53	237.147	4.474
12	Gotong Royong 2	51		



			71.642	1.405
13	Maju Makmur	109	258.684	2.373
14	Sido Mukti	94	225.651	2.401
15	Maju Lancar 1	75	172.254	2.297
16	Maju Lancar 2	61	95.145	1.560
17	Harapan Jaya	90	176.234	1.958
18	Prihatin	52	120.498	2.317
19	Rukun Karya	40	99.885	2.497
20	Tani Makmur 1	85	146.172	1.720
21	Tani Makmur 2	55	96.485	1.754
22	Sabar Menanti	52	84.630	1.628
Rata-rata			158.259	2.250

Sumber : Analisis Data Sekunder, 2015

Tabel 15 menunjukkan bahwa rata-rata produksi kelompok tani sebanyak 158.259 kg (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan kilogram) dan rata-rata produksi kebun petani anggota per ha sebanyak 2.250 kg

(dua ribu dua ratus lima puluh kilogram) setara dengan Rp. 2.670.345,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dengan harga rata-rata Rp. 1.186,82 / kg.

Tabel 16. Rata-rata SHU yang diterima petani anggota Giri Sako

No.	Pendapatan (Rp)	Petani Anggota (jiwa)	Persentase (%)
1.	< 1 jt	1	3
2.	1 jt - 2 jt	12	40
3.	> 2 jt	17	57
Jumlah		30	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2015

Tabel 16 menunjukkan rata-rata SHU yang diterima oleh petani anggota di Desa Giri Sako, petani anggota yang menerima pendapatan < Rp. 1.000.000,- adalah petani

anggota yang memiliki lahan seluas 1 ha dan memiliki potongan lebih. Walaupun demikian, KUD Langgeng Giri Sako akan mengupayakan agar petani anggota tersebut tetap

mendapatkan SHU setiap bulan. Bagi petani anggota yang menerima pendapatan Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- dan > Rp. 2.000.000 adalah petani anggota yang memiliki lahan seluas 1 s/d 2 ha lebih, karena satu petani anggota ada yang memiliki lahan lebih dari 2 ha, berikut contoh perhitungan SHU petani anggota :

Potongan Hasil Penjualan TBS Giri Sako

Luas Lahan : 1 ha  
 Hasil Produksi (Q) : 2.250 kg

Harga TBS (P) : Rp. 1.186,82 / kg

Pendapatan Kotor (TR) = P x Q

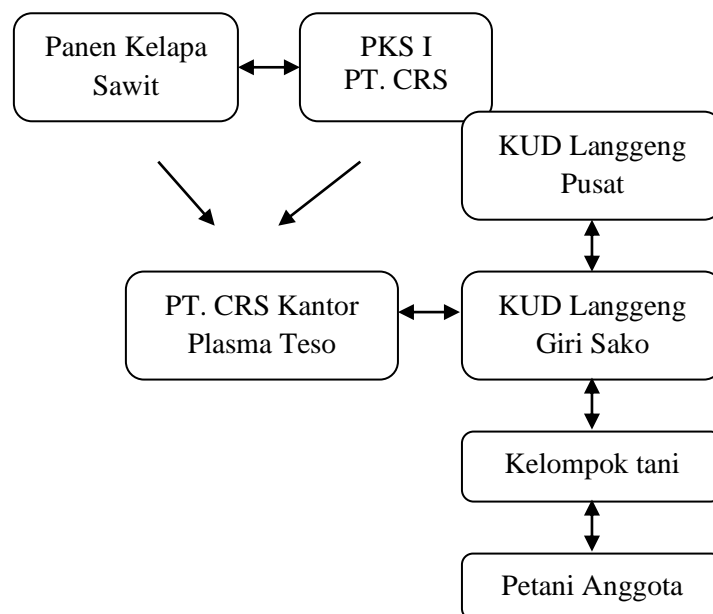
Dikurangi :

- Pupuk Rp. 500.000
- USP Rp. 479.000
- *Replanting* Rp. 50.000
- Up. Timbang Rp. 18.000
- Up. Panen Rp. 225.000
- Pt. Tangkai Pj Rp. 168.750
- Transportasi Rp. 166.500

Total Potongan

Pendapatan Bersih (NR) = TR-TC

Gambar 10. Bagan penerimaan pendapatan SHU



(Sumber : Analisis Data Primer, 2015)

Gambar 10 menunjukkan bahwa SHU yang diterima petani anggota melalui pemotongan pendapatan dari pihak PT. CRS dan KUD Langgeng pusat yaitu potongan biaya *management fee* sebesar 6,2 % dan biaya kredit KKPA. Kemudian di KUD Langgeng Giri Sako akan dilakukan pemotongan hasil penjualan produksi sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk kebun anggota per kelompok tani. Setelah SHU diserahkan kepada kelompok tani, maka kelompok tani akan membuat slip SHU jelas

dengan potongan yang dibebankan kepada petani anggota.

### Tanggapan Petani anggota

Petani anggota merasakan manfaat dari adanya pola kemitraan ini, berawal dari lahan yang tidur dan sekarang menjadi lahan yang produktif sesuai dengan tujuan perusahaan pada saat sosialisasi pembangunan perkebunan pola KKPA. Berikut Tabel respon petani anggota terhadap peran KUD Langgeng Giri Sako :

Tabel 17. Respon petani anggota terhadap peran KUD

No.	Respon Petani	Petani (jiwa)	Persentase (%)
1.	Puas	30	100
2.	Kurang Puas	0	0
3.	Tidak Puas	0	0
Jumlah		30	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2015

Tabel 17 menunjukkan bahwa 100 % petani anggota merasa puas dengan peran KUD yang dirasakan sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. KUD Langgeng Giri Sako didirikan untuk tujuan mensejahterakan petani anggotanya dan kemajuan desa Giri Sako.

Petani anggota merasa puas dengan adanya KUD Langgeng Giri Sako yang telah mengembangkan potensi petani anggota agar dapat mengelola kebun kelapa sawit. Segala hal yang berhubungan dengan kebun kelapa sawit milik anggota dapat diketahui oleh petani karena KUD Langgeng Giri Sako menjamin keterbukaan untuk petani anggota. Dengan adanya kemitraan ini dan manfaat yang dirasakan oleh petani anggota maka petani anggota berharap agar KUD Langgeng Giri Sako tetap merespon aspirasi petani anggota dan meningkatkan kesejahteraan serta tetap menjalin kerjasama dengan PT. CRS agar program kemitraan ini tetap berjalan sampai pada masa *replanting* nanti.

## KESIMPULAN

Analisis dan hasil penelitian yang telah dilakukan di KUD Langgeng Unit Perwakilan Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau PT. Citra Riau sarana (PT. CRS) tentang peran Koperasi dalam manajemen kebun petani anggota pola kemitraan KKPA dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. KUD Langgeng Giri Sako berperan dalam penyediaan modal atau perkreditan, saprodi, tenaga kerja, transportasi TBS, penjualan TBS, Penyuluhan dan pelatihan serta membentuk kelompok tani

untuk membantu petani anggota di lapangan.

2. Setiap kegiatan maupun program yang diadakan oleh KUD Langgeng Giri Sako telah disosialisasikan terlebih dahulu kepada petani anggota, termasuk sosialisasi pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA.
3. Petani anggota berhak mendapatkan pelayanan yang baik, bersifat terbuka dan mendapatkan SHU setiap bulan serta mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi dan pelayanan yang ada di KUD Langgeng Giri Sako.
4. Petani anggota merasa puas terhadap peran KUD Langgeng Giri Sako yang dirasakan sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.F. Stoner James, DKK. 1996. *Manajemen*, Edisi Bahasa Indonesia, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Anonim. 2011. *Kontroversi Kebun Plasma 20 Persen*.  
<http://tabloidmingguandetak.blogspot.com/2011/03/>.
- Anonim. 2012. *Teknologi Budidaya Kelapa Sawit*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- Anonim. 2014. Direktorat Jendral Perkebunan.

- Anonim. 2012. *Kebijakan Hilir Sawit Perlu Diperbaiki, dalam Ekonomi dan Lingkungan Tropis*, Edisi 06/ Tahun V/ 2012, hal. 42-43.
- Chaniago, A. 1984. *Perkoperasian Indonesia*. Angkasa. Bandung.
- Fani. 2011. *Koperasi Unit Desa*. <http://fani4.wordpress.com/2011/12/17>.
- Hape, F.A. 2015. *Peran KUD dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perkebunan Kelapa Sawit*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Yogyakarta.
- Haryono, N. 2005. *Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hudiyanto, 1994. *Sistem koperasi: Ideologi dan Pengolahan*. UII Press. Yogyakarta.
- James A.F Stoner, 1992, "Manajemen", Jilid 1, Jakarta, Erlangga.
- Mangoesnoekarjo, S. dan H. Samangun. 2003. *Manajemen Agribisnis Kelapa Sawit*. UGM-Press. Yogyakarta.
- Marcus Colchester dan Norman Jiwan. 2010. *Principle & Criteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan*. Sertifikasi Grup. Taskforce [www.rspo.org/files/resource\\_centre/key\\_doc/11%2520id\\_RSP](http://www.rspo.org/files/resource_centre/key_doc/11%2520id_RSP).
- Mubyarto. 1987. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta.
- Nelianti, E. 2015. *Peran Koperasi Terhadap Pendapatan Usaha Petani Plasma Kelapa Sawit Di PT. HSL (Cargill) Desa Asam Besar Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Kal-Bar*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Yogyakarta.
- Pahan, I. 2006. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Pahan. I.2007. *Kelapa Sawit "Manajemen Agribisnis dari Hulu Hingga Hilir"*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Pahan, I. 2008. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- PT. CRS, 2013. *Social Impact Assessment*. Riau
- Putra, P.N. 2004. *Peran Koperasi Terhadap Perkembangan Usaha Ternak Sapi Perah di Kabupaten Boyolali*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Yogyakarta.
- Santoro, A. 2012. *Pola Kemitraan PT. Harapan Sawit Lestari Dengan Petani Plasma Kelapa Sawit Di Desa Asam Besar*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Yogyakarta.
- Soekartawi. 1990. *Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press
- Soetrisno. L & R.Winahyu, 1991. *Kelapa Sawit: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya media.
- Sugito. 1992. *Upaya Peningkatan Efisiensi dalam Usaha Pengolahan Kelapa Sawit*. Tesis. [www.digilib.its.ac.id](http://www.digilib.its.ac.id). (Astra Agro Lestari Verbatim copying, tidak dipublikasikan).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, Irna. 1986. "Koperasi: Organisasi Ekonomi yang berwatak sosial". Bhratara. Jakarta.
- Taofan, A. P. 2011. *Manajemen Satu Atap Inti – Plasma*. <http://kelapasawituntukbumi.blogspot.com/2011>.
- Vera, J. 2013. <http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id>.
- Winarni, D.Y. 2015. *Kajian Kemitraan antara PG. Madukismo dengan Petani Tebu Rakyat Mandiri (TRM) di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Yogyakarta.